



Pemanfaatan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Utilization of the SAKTI (Agency-Level Financial Application System) Application to Ensure Transparency and Accountability in Financial Management at the State Treasury Service Office

Allya Sepria Utami¹, Ghea Septiani Ajiman², Chelsia Turnip³, M.Irfan⁴, Yulia Hanoselina⁵

Universitas Negeri Padang

Email: xlyx0609@gmail.com¹, gheaseptianajiman231@gmail.com², chelsyturnip09@gmail.com³
mohammadifan10gg@gmail.com⁴, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 30-11-2025

Revised : 01-12-2025

Accepted : 03-12-2025

Pulished : 05-12-2025

Abstract

The management of state finances requires a system that is accurate, transparent, and accountable in order to minimize administrative errors and prevent potential misuse of public funds. Prior to the development of SAKTI, financial management in government institutions relied on multiple disconnected applications and manual processes, resulting in data inconsistencies, inefficiencies, and limited transparency. This study aims to analyze how the implementation of the SAKTI application enhances transparency and accountability in financial management at the State Treasury Service Office (KPPN) Padang. Using a qualitative approach, data were collected through interviews with KPPN staff, direct observations of service processes, and document analysis including SOPs, IKPA reports, and training materials. The findings reveal that SAKTI successfully integrates the entire financial cycle—from planning and budgeting to disbursement and reporting—into a single, web-based and real-time platform. This integration increases efficiency, strengthens audit trails, accelerates service delivery, and reduces the risk of fraud. KPPN Padang has also demonstrated organizational readiness through continuous assistance to spending units, the adoption of digital signatures, activity logs, and strong public information disclosure practices. Overall, the use of SAKTI significantly improves the effectiveness, transparency, and accountability of state financial management and supports ongoing public sector digital transformation.

Keywords : SAKTI, State Finances, Transparency, Accountability

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara menuntut sistem yang akurat, transparan, dan akuntabel untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan. Permasalahan utama dalam tata kelola keuangan sebelum hadirnya SAKTI adalah penggunaan banyak aplikasi berbeda, proses manual yang mempunyai risiko tinggi pada kesalahan input, serta keterbatasan transparansi proses transaksi. Studi ini mempunyai tujuan dalam melaksanakan analisis bagaimana pengimplementasian aplikasi SAKTI meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di KPPN Padang. Metode penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pegawai KPPN, observasi langsung terhadap proses layanan, serta analisis dokumen seperti SOP, laporan IKPA, dan materi sosialisasi SAKTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKTI berhasil mengintegrasikan semua proses keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan secara digital dan *real-time*, yang berdampak pada peningkatan efisiensi, penguatan *audit trail*, percepatan layanan, serta penurunan risiko fraud. KPPN Padang juga menunjukkan kesiapan organisasi melalui pendampingan intensif satuan kerja, penerapan tanda tangan digital, pemanfaatan log aktivitas, dan keterbukaan informasi publik yang memperkuat kepercayaan



masyarakat. Secara keseluruhan, pemanfaatan SAKTI terbukti dapat menguatkan tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, transparan, serta akuntabel.

Kata Kunci: SAKTI, Keuangan Negara, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara adalah salah satu aspek penting untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan dan keandalan merupakan prinsip utama yang harus dijalankan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada publik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah berupaya menghadirkan inovasi sistem yang mampu mengakselerasi optimalisasi keefektifan, efisiensi, serta pertanggungjawaban dalam tata kelola finansial negara.

Salah satu inovasi tersebut adalah hadirnya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikembangkan guna memfasilitasi proses dalam mengelola finansial di satuan kerja. Aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan administrasi, mempercepat alur kerja, serta memberikan transparansi yang lebih luas dalam setiap transaksi keuangan negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjadi lembaga pelaksana perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam penerapan SAKTI. Melalui aplikasi ini, KPPN berupaya memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat mengelola anggaran dengan baik sesuai prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, implementasi SAKTI tidak hanya menjadi langkah modernisasi birokrasi, tetapi juga sebagai upaya merealisasikan pemerintahan yang bersih, transparan, serta terpercaya dalam mengelola keuangan negara.

KPPN Padang adalah salah satu KPPN yang berlokasi strategis di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Menjadi instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPPN Padang memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah Sumatera Barat. KPPN ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pencairan dana APBN kepada satuan kerja (satker) yang ada pada wilayah kerjanya, melakukan rekonsiliasi data keuangan, dan melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu. Wilayah kerja KPPN Padang mencakup Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, , dengan karakteristik utama berupa banyaknya satker yang bergerak di bidang pendidikan dan infrastruktur, wilayah dengan potensi ekonomi yang beragam.

Dalam konteks reformasi birokrasi dan tuntutan akan praktik administrasi kenegaraan yang berkualitas, keterbukaan informasi publik, dan pertanggungjawaban dalam manajemen fiskal negara menjadi isu krusial yang terus menjadi perhatian publik. Masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan anggaran publik. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan negara, salah satunya melalui penyempurnaan serta pengoperasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI yaitu aplikasi terpadu yang dirancang untuk memfasilitasi tata kelola finansial negara secara komprehensif, termasuk dari perencanaan, pengaplikasian, hingga pelaporan. Implementasi SAKTI diinginkan bisa mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk di KPPN Padang. Dengan SAKTI, proses pengelolaan



keuangan diharapkan menjadi lebih terstandarisasi, termonitor, dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Namun, implementasi SAKTI di KPPN Padang, sebagaimana di KPPN lainnya, tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan dan kendala mungkin timbul, seperti kesiapan sumber daya manusia untuk mempergunakan aplikasi, ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi (TI), serta penyesuaian terhadap perubahan proses bisnis yang signifikan. Selain itu, karakteristik wilayah Sumatera Barat dengan kondisi geografis yang beragam dan potensi bencana alam juga dapat mempengaruhi kelancaran implementasi SAKTI. Atas dasar tersebut, kajian ini bermaksud melakukan penelusuran secara intensif pemanfaatan aplikasi SAKTI dalam mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di KPPN Padang. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana aplikasi SAKTI diimplementasikan, manfaat yang diperoleh, tantangan yang dialami, serta strategi yang dilaksanakan guna menghadapi tantangan tersebut.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan studi kasus melalui teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan para pejabat dan staf KPPN Padang, observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan yang menggunakan aplikasi SAKTI, studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya, serta analisis data sekunder yang relevan. Hasil temuan ini diharap mampu menggambarkan secara komprehensif terkait seberapa efektif pemanfaatan SAKTI di KPPN Padang, mengetahui aspek-aspek kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SAKTI, beserta menyampaikan saran yang konstruktif bagi perbaikan dan pengembangan sistem tata Kelola finansial negara yang semakin optiml pada waktu mendatang, khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial dalam mengimplementasikan tata kelola fiskal nasional yang berlandaskan keterbukaan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mengoptimalkan tingkat keyakinan publik pada pemerintah dan mendukung pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan. Kajian ini juga diharapkan mampu dijadikan rujukan bagi KPPN lain di seluruh Indonesia yang sedang atau akan mengimplementasikan aplikasi SAKTI, serta bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan tata kelola keuangan negara yang optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan instrumen utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang menuntut efektivitas, efisiensi, serta kepastian pertanggungjawaban dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran. Imelda et al. (2024) menyatakan bahwa sistem pencatatan keuangan yang baik harus mampu menjamin keandalan data serta mendukung proses audit secara menyeluruh. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara membutuhkan mekanisme regulasi, pengawasan, dan evaluasi yang menjamin bahwasanya seluruh rupiah anggaran dimanfaatkan guna kepentingan publik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi

Transparansi pada pengelolaan keuangan negara merujuk terhadap terbukanya data finansial yang mudah dijangkau, dipantau, serta mudah dimengerti oleh pihak berkepentingan. Qurratu'Aini



(2025) menjelaskan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tetapi juga kemampuan pengguna dalam memaknai informasi tersebut untuk tujuan pengawasan. Dalam literatur, transparansi dipandang sebagai pilar penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mengurangi peluang terjadinya penyimpangan anggaran. Keterbukaan data keuangan memungkinkan evaluasi objektif terhadap kebijakan dan pelaksanaan anggaran pada tingkat instansi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran secara prosedural dan hukum. Putri & Harahap (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas membutuhkan bukti transaksi yang dapat diverifikasi dan mengikuti standar regulasi yang berlaku. Dalam konteks keuangan negara, akuntabilitas berkaitan dengan dokumentasi yang lengkap, mekanisme verifikasi, serta audit yang dapat menelusuri alur penggunaan dana. Suryanto (2025) menekankan bahwa digitalisasi sistem keuangan memiliki potensi besar memperkuat akuntabilitas karena menyediakan jejak transaksi yang terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan mengurangi ruang terjadinya kecurangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dirancang untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data primer dari konteks empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian pada penerapan Aplikasi SAKTI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, sehingga memerlukan pemahaman komprehensif terhadap pengalaman, interaksi, dan praktik operasional para pegawai dalam mengelola sistem tersebut. Untuk memperoleh data yang holistik, penelitian ini menerapkan tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ketiga ini diterapkan secara simultan untuk memastikan akurasi, kedalaman, dan verifikasi temuan melalui triangulasi. Wawancara, observasi, dan dokumentasi berfungsi sebagai metode inti dalam pengumpulan data penelitian ini, karena ketiganya saling melengkapi dalam menyediakan representasi faktual terhadap implementasi Aplikasi SAKTI di KPPN Padang. Wawancara dilakukan melalui dialog langsung antara peneliti dan informan untuk menyingkap pemahaman mendalam, pengalaman, serta persepsi terkait pemanfaatan Aplikasi SAKTI, termasuk dampaknya terhadap transformasi proses administrasi, peningkatan efisiensi pencatatan, serta kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga (Putri & Murhayati, 2025; Yasin et al., 2024).

Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pegawai, tingkat kompetensi mereka terhadap fitur aplikasi, serta respons terhadap kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan. Sementara itu, observasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap lingkungan kerja di KPPN Padang untuk mengkaji interaksi pegawai dengan Aplikasi SAKTI dalam konteks, praktis mulai dari input transaksi, verifikasi tahapan, alur persetujuan, hingga penanganan masalah teknis atau penyimpangan dari standar operasional prosedur (SOP). Metode ini menghasilkan data empiris yang memfasilitasi pemahaman kondisi aktual yang tidak selalu dapat diungkapkan secara verbal oleh informan (Yasin et al., 2024; Putri & Murhayati, 2025). Selain itu,



dokumentasi analisis meliputi berbagai dokumen resmi, seperti SOP pemanfaatan SAKTI, laporan keuangan periodik, arsip transaksi digital, hasil audit internal dan eksternal, serta materi pelatihan pegawai. Metode ini menyediakan bukti tujuan yang memperkuat hasil wawancara dan observasi, serta memungkinkan verifikasi silang untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2024; Jurnal Penelitian Indonesia tentang Pendidikan [IRJE], 2025). Dengan pengintegrasian metode ketiga secara simultan, penelitian ini memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas Aplikasi SAKTI dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di KPPN Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sebuah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola perbendaharaan dan menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat daerah, termasuk menyalurkan pembiayaan anggaran dan menatausahaan pendapatan dan pengeluaran negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2017, KPPN Padang memiliki mandat untuk menjalankan otoritas perbendaharaan dan fungsi bendahara umum negara, melakukan penyaluran berbagai pembayaran yang menjadi beban anggaran, serta menyelenggarakan administrasi atas pendapatan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan melalui maupun berasal dari kas negara sesuai ketentuan regulasi undang-undang yang diberlakukan.

Reformasi Birokrasi yang diterapkan di Kementerian Keuangan pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-44/PB/2007 mengenai Pembaharuan Birokrasi pada Unit Ditjen Perbendaharaan, yang pada esensinya bertujuan merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mengoptimalkan kualitas layanan terhadap publik melalui pelaksanaan rangkaian sistem yang dipusatkan, antara lain pada penyusunan ulang struktur kelembagaan, perbaikan prosedur operasional, serta penguatan manajemen ketenagakerjaan.



(Gambar 1. Logo SAKTI)

Sumber : Situs Resmi Sakti diakses pada 27 November 2025.)

Latar Belakang SAKTI

Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (IFMIS) yang digunakan di sisi Pengguna Anggaran untuk mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).



SPAN sendiri adalah mekanisme terintegrasi yang mengelola secara keseluruhan pada tahap mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara modern dan terotomatisasi, yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 sebagai tonggak modernisasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Latar belakang pengembangan aplikasi SAKTI berasal dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menuntut agar tata kelola keuangan publik diadaptasikan selaras dengan kemajuan teknologi terkini. Kaidah praktik terbaik untuk mengelola finansial negara modern merekomendasikan penerapan IFMIS guna menjamin keterbukaan, pertanggungjawaban, serta efektivitas dalam tata kelola fiskal nasional. SAKTI lahir sebagai solusi untuk mempermudah satuan kerja dalam mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran secara terintegrasi dan berbasis sistem elektronik pada akhirnya mempermudah tugas dalam bekerja, cepat, dan akurat tanpa harus mengakses banyak aplikasi secara terpisah.

SAKTI memadukan berbagai aplikasi yang sebelumnya dipergunakan unit kerja ke dalam satu platform dengan konsep database tunggal, mendukung pengelolaan APBN yang transparan dan terstandarisasi berdasar pada ketentuan undang-undang yang ditetapkan. Sebagai hasilnya, SAKTI menjadi bagian penting dari transformasi pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya mengedepankan teknologi informasi terintegrasi tetapi juga menempatkan fungsi pengelolaan oleh pengguna anggaran secara modern dan terstandarisasi guna mengoptimalkan efektivitas, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam tata kelola SAKTI (Pengguna Anggaran) merupakan perwujudan penerapan konsep *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) pada sisi Pengguna Anggaran.

Konsep SAKTI

Konsep SAKTI terdiri dari tiga aspek utama yang saling mendukung dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan terintegrasi. SAKTI menggunakan satu basis data tunggal yang dikelola secara database oleh Kementerian Keuangan, sehingga semua pengguna di berbagai satuan kerja, wilayah, unit, dan kementerian/lembaga dapat mengakses data yang sama secara real time. Hal ini memastikan konsistensi dan keakuratan informasi dari penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban APBN. SAKTI dirancang sebagai satu aplikasi terpadu yang digunakan untuk seluruh proses keuangan mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan menggunakan satu aplikasi untuk semua level, SAKTI mendorong adanya standar yang sama dalam pengelolaan keuangan dan memudahkan konsolidasi data antar entitas. Pengguna hanya perlu memasukkan data satu kali saja (single entry point), yang kemudian dapat digunakan oleh modul lain tanpa input ulang. Sistem ini juga dilengkapi mekanisme maker-checker approver untuk memastikan validitas dan kontrol transaksi keuangan. SAKTI mencakup seluruh tingkat organisasi, mulai dari satuan kerja, wilayah, unit, hingga kementerian/lembaga, dengan modul yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sistem ini terhubung langsung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sehingga laporan keuangan satker dapat dihasilkan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan. Integrasi ini mendukung pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.



Keunggulan SAKTI

Keunggulan SAKTI sangat beragam dan mendukung efisiensi serta keamanan dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama, SAKTI menggunakan platform terbuka yang memungkinkan akses melalui berbagai perangkat dan sistem operasi, sehingga memudahkan pengguna dari berbagai perangkat. Selain itu, aplikasi SAKTI bersifat ringan sehingga spesifikasi hardware pengguna tidak terlalu mempengaruhi kecepatan proses, membuat aplikasi ini cepat dan responsif. Data transaksi di SAKTI juga disajikan secara real time, menjamin informasi keuangan yang selalu terbarui.

SAKTI menyediakan 14 periode pengelolaan keuangan, yang meliputi 12 periode bulan kalender, satu periode penyusunan laporan keuangan (LK) yang tidak diaudit, dan satu periode penyusunan LK yang diaudit, sehingga mendukung waktu manajemen yang terstruktur. Kemudahan akses juga menjadi keunggulan utama, karena pengguna dapat mengakses aplikasi kapan saja dan dari mana saja melalui jaringan internet tanpa perlu melakukan instalasi atau pembaruan aplikasi. Informasi keamanan diperkuat dengan penggunaan One Time Password (OTP), yaitu kode unik yang dikirimkan ke pengguna dan hanya berlaku untuk satu transaksi atau waktu singkat, sehingga mengurangi risiko akses tidak sah. Selain itu, SAKTI memiliki fitur otomasi jurnal dan audit trail yang meningkatkan akurasi pencatatan keuangan dan meminimalkan kebutuhan input jurnal secara manual. Adanya riwayat perubahan transaksi di setiap tahap memudahkan pelacakan dan pengawasan. Laporan dapat dihasilkan setiap hari, baik laporan keuangan maupun laporan barang milik negara (BMN), sehingga mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Penggunaan OTP dalam sistem SAKTI membantu menjaga keamanan transaksi elektronik dengan lapisan proteksi tambahan yang mencegah tindakan penipuan.

Fitur SAKTI

Fitur utama aplikasi SAKTI mencakup beberapa aspek penting yang mendukung pengelolaan keuangan yang efisien dan aman. Pertama, Access Control List (ACL) digunakan untuk mengatur kewenangan atau hak akses pengguna, seperti kemampuan untuk merekam, mengubah, atau menghapus data transaksi, sehingga memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan tindakan tertentu dalam aplikasi. Kedua, konsep Single Entry Point memungkinkan transaksi hanya diinput sekali saja, menghilangkan redundansi dan mengurangi kesalahan manusia atas transaksi yang sama, karena data yang sudah dimasukkan dapat langsung digunakan oleh modul-modul lain tanpa perlu diinput ulang.

Ketiga, Lapisan Integrasi memungkinkan aplikasi SAKTI untuk berkomunikasi dengan berbagai sistem lain, baik di lingkungan Kementerian Keuangan, perbankan, pasar, maupun sistem internal kementerian/lembaga lainnya. Hal ini menjadikan SAKTI sebagai sistem yang terintegrasi secara luas, memudahkan pertukaran data, dan menyatukan proses pengelolaan keuangan secara end-to-end dengan berbagai platform terkait. Dengan fitur-fitur ini, SAKTI mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan, akurat, dan efisien melalui mekanisme kontrol yang kuat dan sistem integrasi yang komprehensif.



Manfaat SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) memberikan berbagai manfaat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama, SAKTI menghadirkan operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dengan menggunakan satu aplikasi terpadu untuk seluruh siklus keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaporan. Hal ini menggambarkan proses dan memudahkan pengelolaan dana negara. Kedua, SAKTI meningkatkan efisiensi sumber daya, tidak hanya dari bidang keuangan seperti penganggaran, tetapi juga sumber daya non-keuangan, sehingga penggunaan dana dan tenaga menjadi lebih optimal. Ketiga, sistem ini mendukung konsolidasi data APBN Kementerian/Lembaga secara lebih cepat karena transaksi dilakukan secara real time dan semua pengguna mengakses informasi database yang sama, sehingga keuangan selalu terupdate dan akurat. Keempat, dengan penerapan dasar akuntansi akrual, SAKTI meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga yang menjadi lebih transparan dan konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Terakhir, diluncurnya SAKTI di seluruh kementerian dan lembaga pada tahun 2021 menjadi momentum penting dalam memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Di tengah dampak pandemi COVID-19, SAKTI memungkinkan layanan pemerintah menjadi lebih mudah diakses dari mana saja, sehingga kualitas dan aksesibilitas layanan publik semakin meningkat.

Dasar Hukum SAKTI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus melakukan inovasi di bidang sistem informasi. Salah satu langkah strategis tersebut adalah penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang menjadi tulang punggung digitalisasi proses pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja. Dasar hukum tersebut yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti

Kedua regulasi ini menjadi landasan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan sistem SAKTI, terutama dalam memastikan proses pelaporan, penganggaran, komitmen, pembayaran, dan pelaporan keuangan dapat berjalan secara terintegrasi dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Dengan berpedoman pada dasar hukum tersebut, KPPN diharapkan mampu mendukung terciptanya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Urgensi dan Tujuan Pengembangan SAKTI

Urgensi pengembangan aplikasi SAKTI tidak dapat dilepaskan dari kelemahan historis sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang sebelumnya terfragmentasi dalam berbagai aplikasi seperti SAIBA, SAS, SIMAK-BMN, Persediaan, dan OM-SPAN. Fragmentasi ini menciptakan *data silos* yang menyebabkan duplikasi, inkonsistensi laporan, serta tingginya risiko kehilangan data akibat penyimpanan lokal di komputer instansi. Sistem keuangan pemerintah yang terpisah-



pisah memperbesar potensi kesalahan administratif dan menyulitkan proses audit karena tidak adanya integrasi data lintas modul. Pengembangan SAKTI kemudian menjadi krusial karena menawarkan konsep “One Database, One Application” yang menyatukan keseluruhan siklus pengelolaan APBN—mulai perencanaan, pelaksanaan anggaran, aset, hingga pertanggungjawaban ke dalam satu platform berbasis web. Model integrasi ini terbukti bahwa sistem keuangan berbasis web terintegrasi mampu mengurangi *human error* sekaligus memperkuat *audit trail* untuk mendukung transparansi.

Selain itu, SAKTI berfungsi sebagai fondasi transformasi digital sektor publik yang menekankan efisiensi dan penyederhanaan proses bisnis, sesuai dengan kajian Prasojo (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi menurunkan biaya operasional dan meminimalkan interaksi manual yang rentan manipulasi. Pengalaman saat pandemi COVID-19 semakin menegaskan nilai strategis SAKTI meskipun pegawai bekerja dari rumah, seluruh proses pengelolaan keuangan tetap berjalan secara normal. Hal ini memperkuat bahwa ketahanan sistem digital menjadi syarat utama keberlanjutan layanan publik dalam kondisi krisis. Dengan demikian, SAKTI tidak hanya hadir sebagai solusi teknis terhadap keterbatasan aplikasi sebelumnya, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat efisiensi, akurasi, konektivitas data, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

Proses Implementasi dan Adaptasi SAKTI

Proses implementasi SAKTI yang dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam sistem keuangan pemerintah bergantung pada kemampuan organisasi mengelola perubahan secara terstruktur. Pendekatan *phased piloting* yang diterapkan, di mana KPPN Padang turut berperan sebagai pendamping utama sejak fase awal 2018–2020, memberikan ruang bagi satuan kerja untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sebelum sistem diberlakukan secara penuh. implementasi IFMIS (Integrated Financial Management Information System) sering hanya berhasil bila dilakukan secara bertahap agar resistensi dan kesalahan operasional dapat diminimalkan. Beragam bentuk pelatihan seperti BIMTEK, workshop, e-learning, dan pendampingan PTPN menjadi faktor pendukung adaptasi karena menyediakan kontinum pembelajaran yang memungkinkan pengguna memahami perubahan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi prosedural.

Keberhasilan adaptasi di KPPN Padang juga dipengaruhi oleh konsistensi sistem SAKTI yang masih mempertahankan alur kerja dasar seperti penyusunan DIPA, pencairan dana, dan pelaporan, sehingga pengguna tidak sepenuhnya berhadapan dengan “disruption”, melainkan “digital shift” yang lebih mudah diterima. Adopsi teknologi publik akan lebih efektif bila inovasi mengikuti pola kerja lama yang sudah akrab bagi operator, sambil tetap meningkatkan efisiensi. Faktor SDM kemudian menjadi penentu utama, di mana pegawai KPPN tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan, tetapi berperan sebagai mentor dan fasilitator, mencerminkan model *participatory implementation* bahwa keberhasilan reformasi teknologi di sektor publik sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi, pembinaan berkelanjutan, dan kemampuan instansi membangun rasa percaya diri pengguna. Dengan demikian, proses implementasi SAKTI di KPPN Padang memperlihatkan bahwa inovasi teknologi bukan hanya masalah perangkat lunak, tetapi transformasi perilaku, pembelajaran organisasi, dan tata kelola perubahan yang terencana.



Kolaborasi dan Dukungan Pengguna oleh KPPN Padang

Kolaborasi yang dibangun KPPN Padang melalui program *financial advisor* dan forum “Bacarito” menunjukkan pendekatan pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperkuat ekosistem pembelajaran antarsatuan kerja dalam pemanfaatan aplikasi SAKTI. Keberhasilan implementasi sistem keuangan pemerintah berbasis digital sangat bergantung pada kemampuan organisasi menciptakan mekanisme *knowledge sharing* yang terstruktur agar operator mampu mengatasi kendala operasional secara mandiri. Kunjungan rutin minimal lima kali per bulan meningkatkan intensitas interaksi dan mendorong transfer pengetahuan, namun efektivitasnya tetap perlu dievaluasi melalui indikator seperti penurunan tingkat kesalahan transaksi, percepatan waktu pemrosesan, atau menurunnya jumlah temuan audit, bahwa pendampingan teknis baru dianggap berhasil bila berdampak langsung pada peningkatan kinerja sistem akuntabilitas internal.

Penguatan kolaborasi melalui kanal digital seperti WhatsApp “SIAP 010”, HCSO berbasis web, dan komunitas “Maju Basamo” yang menunjukkan bahwa multi-channel support dapat meningkatkan kecepatan respons dan efisiensi penyelesaian masalah dalam sistem keuangan berbasis aplikasi, selama tetap memperhatikan keamanan data dan rekam jejak audit. Kehadiran kewajiban sertifikasi bagi pejabat keuangan Bendahara, PPK, dan PPSPM lebih lanjut mempertegas profesionalisme dalam tata kelola keuangan negara yang menekankan bahwa kompetensi aparatur merupakan determinan utama keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan demikian, strategi kolaboratif KPPN Padang tidak hanya memperkuat dukungan teknis dalam penggunaan aplikasi SAKTI, tetapi juga menempatkan KPPN sebagai pusat pembelajaran (*knowledge hub*) yang mendorong budaya kolaboratif, peningkatan kompetensi berkelanjutan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan satuan kerja.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas SAKTI

Penerapan SAKTI secara signifikan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui mekanisme pengawasan digital yang lebih ketat dan berbasis *real-time*. Sistem *log activity* yang mencatat setiap tindakan pengguna meliputi waktu, identitas pelaku, hingga perubahan pada dokumen menciptakan *audit trail* yang tidak dapat dimanipulasi. Pencatatan digital otomatis dalam IFMIS meningkatkan keandalan pemeriksaan internal dan eksternal karena alur transaksi dapat ditelusuri secara lengkap. Implementasi tanda tangan digital bekerja sama dengan BSSN juga menjadi komponen penting dalam menjaga integritas dokumen. Dengan adanya validasi kriptografis, perubahan sekecil apa pun pada dokumen setelah penandatanganan langsung terdeteksi sistem, sehingga meminimalkan potensi pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang. Tanda tangan digital merupakan instrumen krusial dalam membangun akuntabilitas berbasis integritas pada sektor publik.

Integrasi SAKTI dengan dashboard SPAN memungkinkan pimpinan kementerian, Kemenkeu, hingga Presiden memantau realisasi APBN secara *real-time*, yang memperluas ruang pengawasan dan memperkecil celah administratif. BPK juga memperoleh manfaat karena akses data yang terverifikasi mempersingkat proses audit dan meningkatkan objektivitas pemeriksaan. Transparansi berbasis data *real-time* merupakan fondasi utama reformasi keuangan negara karena memungkinkan masyarakat, pengawas, dan pembuat kebijakan mendapatkan informasi secara terbuka dan akurat. Oleh karena itu, SAKTI bukan hanya sistem teknis, tetapi manifestasi reformasi



birokrasi yang mengedepankan keterbukaan, kepercayaan publik, dan integritas pengelolaan APBN.

Pihak Yang Terlibat Dalam Penggunaan SAKTI

Implementasi SAKTI menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan keuangan digital sangat ditentukan oleh pembagian peran yang jelas di antara para aktor yang terlibat, baik di tingkat satuan kerja maupun KPPN. Di tingkat satker, struktur aktor seperti KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan membentuk rantai otorisasi yang memastikan setiap transaksi memiliki dasar hukum, dokumen pendukung, serta validasi berlapis sebelum diproses dalam sistem. Kejelasan struktur aktor dalam sistem keuangan publik merupakan prasyarat utama bagi terciptanya *internal control* yang kredibel. Sementara itu, peran KPPN melalui seksi Pencairan Dana, Bank, Verifikasi Akuntansi, serta Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal memperkuat mekanisme *check and balance* karena transaksi tidak hanya diverifikasi di satuan kerja, tetapi juga diuji oleh otoritas perbendaharaan sebagai lembaga yang memegang fungsi otorisasi terakhir.

Model pengawasan berlapis seperti ini menurunkan risiko penyimpangan karena setiap keputusan keuangan harus melewati beberapa titik kontrol yang dapat dilacak secara digital. Sinergi lintas fungsi antara satker dan KPPN juga memperkuat keandalan data karena setiap pihak memiliki kewenangan khusus yang saling melengkapi misalnya PPK memastikan legalitas komitmen, PPSPM menilai kelengkapan dan kebenaran tagihan, dan seksi verifikasi KPPN memvalidasi kesesuaian dengan regulasi perbendaharaan. Model kolaborasi terstruktur ini menegaskan bahwa sistem informasi keuangan hanya efektif jika desain organisasinya mampu mendistribusikan peran secara proporsional sehingga kewenangan tidak terpusat pada satu aktor saja. Dengan demikian, pembagian peran dalam penggunaan SAKTI bukan sekadar aspek administratif, melainkan fondasi tata kelola keuangan negara yang memastikan akurasi data, mencegah penyalahgunaan, dan menjadikan sistem perbendaharaan lebih akuntabel dan transparan.

Alur Kerja SAKTI

Alur kerja SAKTI mencerminkan digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya sangat bergantung pada dokumen fisik dan proses manual. Integrasi antara tahapan perencanaan anggaran, pengajuan pembayaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban menciptakan alur kerja yang tidak terputus (end-to-end flow), sehingga setiap aktivitas dapat ditelusuri dan divalidasi dalam satu basis data. Efisiensi ini sangat berbeda dibandingkan sistem lama yang membuat instansi harus berpindah antar aplikasi dengan risiko inkonsistensi data yang tinggi. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi mampu mengurangi waktu pemrosesan transaksi hingga lebih dari 60% karena hilangnya kebutuhan pengiriman dokumen fisik dan verifikasi berulang.

Dalam konteks SAKTI, percepatan ini terlihat dari pemrosesan SPM yang sebelumnya membutuhkan beberapa hari, kini dapat selesai dalam hitungan jam karena seluruh dokumen bersifat digital dan dapat diverifikasi otomatis oleh sistem maupun KPPN. Integrasi langsung dengan perbankan pemerintah juga mempercepat pencairan dana ke rekening penerima hak, memperbaiki aliran kas dan menekan keterlambatan pembayaran, merupakan faktor penting dalam menjaga kredibilitas fiskal pemerintah. Selain mempercepat proses, alur kerja SAKTI memperkuat



akurasi pelaporan karena setiap data yang masuk ke sistem sudah melalui validasi berlapis dan tidak dapat diubah tanpa jejak digital. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penggunaan sistem keuangan berbasis integrasi meningkatkan keandalan laporan keuangan negara dan mendukung keberlanjutan opini WTP. Dengan demikian, alur kerja SAKTI bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi transformasi struktural yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas tata kelola keuangan negara.

Tingkat Pemanfaatan dan Kualitas Penggunaan SAKTI

Evaluasi tingkat pemanfaatan SAKTI melalui Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan bahwa kualitas penggunaan aplikasi tidak hanya bergantung pada fitur sistem, tetapi pada sejauh mana satuan kerja mampu mengelola proses administrasi anggarannya secara disiplin dan tepat waktu. Temuan lapangan yang memperlihatkan sebagian besar satker KPPN Padang berada pada kategori “Baik” dan “Cukup” menandakan bahwa SAKTI bekerja efektif dalam mendukung pelaksanaan anggaran, sementara nilai yang belum maksimal justru banyak disebabkan oleh keterlambatan penyusunan dokumen atau revisi DIPA yang merupakan tanggung jawab internal organisasi. Hambatan implementasi sistem keuangan digital di Indonesia lebih sering muncul dari kelemahan manajemen dokumen dan koordinasi internal, ketimbang dari kerentanan teknis aplikasi.

Karena itu, peningkatan literasi digital dan pemahaman regulasi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan performa satker. Kompetensi pengguna merupakan determinan utama efektivitas sistem informasi keuangan publik. Tren positif pemanfaatan SAKTI di KPPN Padang juga memperlihatkan konsistensi dengan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran secara nasional, yang menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan melalui SAKTI berhasil memperbaiki akurasi realisasi, mempercepat proses, dan menekan kesalahan administratif. IFMIS yang digunakan secara optimal mampu meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pelaksanaan anggaran di berbagai instansi pemerintah. Dengan demikian, kualitas pemanfaatan SAKTI di KPPN Padang mencerminkan bahwa teknologi telah berjalan efektif, namun penguatan manajemen internal, profesionalisme administrasi, dan kapasitas SDM tetap menjadi syarat utama untuk mencapai skor IKPA yang ideal dan memastikan keberlanjutan reformasi pengelolaan keuangan negara.

Manfaat Efisiensi SAKTI bagi KPPN Padang

Penerapan SAKTI memberikan efisiensi yang signifikan bagi KPPN Padang karena digitalisasi proses keuangan memungkinkan percepatan layanan dan pengurangan beban administrasi. Penurunan waktu pemrosesan SPM dari beberapa jam menjadi kurang dari satu jam menunjukkan bahwa sistem digital tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga meningkatkan ketepatan verifikasi dokumen dan mengurangi *bottleneck* birokrasi. Digitalisasi perbendaharaan mampu memangkas waktu proses hingga 70% karena otomatisasi validasi dan eliminasi dokumen fisik. Pengurangan penggunaan kertas dan biaya operasional lainnya juga menegaskan keuntungan *paperless office*.

Efisiensi ini semakin terlihat dari kemampuan KPPN Padang yang hanya memiliki 23 pegawai tetapi mengelola APBN sebesar Rp16 triliun untuk cakupan wilayah satu provinsi dan empat kabupaten cermin bahwa kapasitas output meningkat signifikan tanpa penambahan sumber daya manusia. Faktor penentu keberhasilan ini tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada



budaya integritas dan disiplin kerja pegawai yang diperkuat melalui sertifikasi ISO SMAP (anti-penyuapan), ISO SMM (manajemen mutu), serta predikat WBK dan WBBM. Sistem digital hanya optimal jika didukung oleh etika organisasi, kepatuhan prosedural, dan komitmen antikorupsi. Dengan demikian, SAKTI tidak sekadar menjadi alat administratif, tetapi instrumen yang memperkuat tata kelola bersih dan profesional serta mendorong transformasi budaya kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel di KPPN Padang.

Penanganan Penyimpangan SAKTI

Penerapan prinsip *Zero Trust System* dalam SAKTI menunjukkan bagaimana digitalisasi mampu mengubah paradigma pengawasan keuangan negara dari model berbasis kepercayaan personal menjadi pengawasan sistemik yang sepenuhnya mengandalkan verifikasi otomatis dan kontrol berlapis. Dengan mewajibkan setiap transaksi diverifikasi oleh lebih dari satu aktor, SAKTI menghilangkan peluang terjadinya konflik kepentingan, kesalahan input, atau manipulasi dokumen. Mekanisme penyaluran dana langsung ke rekening penerima tanpa melalui bendahara merupakan langkah strategis dalam memutus potensi praktik penggelapan dan *mark-up*, pemangkasan jalur transaksi manual merupakan salah satu cara paling efektif dalam menekan risiko fraud di sektor publik. Fitur pengembalian dana otomatis dan pencatatan resmi ke kas negara juga memperlihatkan standar akuntabilitas yang lebih kuat, karena setiap kesalahan entri atau kelebihan bayar dapat diperbaiki tanpa membuka ruang untuk manipulasi.

Selain itu, penggunaan digital signature memastikan bahwa setiap dokumen yang sudah disahkan tidak dapat diubah tanpa terdeteksi oleh sistem, teknologi kriptografi merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas dokumen pemerintahan. Sistem *audit trail* forensik dalam SAKTI memungkinkan pelacakan aktivitas secara komprehensif, sehingga setiap penyimpangan dapat ditelusuri hingga ke pelakunya. sistem informasi keuangan terintegrasi efektif menurunkan potensi korupsi karena seluruh aktivitas pengguna terekam dan tidak dapat dihapus. Dengan demikian, penanganan penyimpangan dalam SAKTI tidak hanya mengandalkan prosedur administratif, tetapi pada desain teknologi yang secara inheren menciptakan pengawasan end-to-end, menjadikan digitalisasi sebagai instrumen preventif yang memperkuat integritas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan secara sistematis.

Keterbukaan Informasi Publik KPPN Padang

Komitmen KPPN Padang dalam keterbukaan informasi publik menunjukkan bagaimana prinsip *transparency by design* diterapkan secara nyata dalam pelayanan perbendaharaan. Penyediaan akses informasi melalui situs resmi s.id/kppnpadang dan microsite "Pandai Bana" menjadi bentuk digitalisasi layanan publik yang memungkinkan masyarakat, satuan kerja, dan pemangku kepentingan memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan terstandar. Portal informasi publik berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara karena mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas. Ketersediaan panduan teknis SAKTI, materi BIMTEK, dan FAQ dalam microsite tersebut menunjukkan bahwa KPPN Padang tidak hanya mempublikasikan informasi administratif, tetapi juga mentransformasikannya menjadi *knowledge center* yang memperkuat kapasitas satuan kerja.



Publikasi rutin melalui Instagram resmi, termasuk update realisasi APBN dan kegiatan layanan publik, mencerminkan praktik *proactive disclosure*. Pemerintah memperluas ruang partisipasi publik dan meningkatkan transparansi fiskal melalui penyebaran data yang mudah dipahami. Aspek keterbukaan ini juga ditunjang oleh inisiatif inklusif di lingkungan kantor, seperti ruang laktasi, aksesibilitas disabilitas, dan Wi-Fi publik, yang memperlihatkan orientasi pelayanan publik yang humanis. Transparansi tidak hanya terkait penyediaan informasi, tetapi juga memastikan fasilitas layanan ramah, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, upaya keterbukaan informasi publik di KPPN Padang menunjukkan bahwa digitalisasi, aksesibilitas, dan desain layanan yang responsif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan *good governance* yang informatif, inklusif, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Pemanfaatan aplikasi SAKTI di KPPN Padang menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan negara mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan APBN. Integrasi proses perencanaan, penganggaran, pencairan dana, hingga pelaporan ke dalam satu sistem berbasis web telah berhasil menghilangkan hambatan birokrasi lama dan mempercepat layanan secara substansial. Penerapan fitur seperti *digital signature*, *audit trail*, *zero trust system*, serta mekanisme verifikasi berlapis mampu meminimalkan potensi penyimpangan, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan bahwa setiap transaksi dapat ditelusuri secara forensik.

Selain itu, keberhasilan implementasi SAKTI sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM, pendampingan berkelanjutan, serta komitmen KPPN Padang terhadap keterbukaan informasi dan integritas pelayanan publik. Dengan capaian efisiensi, peningkatan nilai IKPA, dan penurunan risiko fraud, SAKTI berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi keuangan negara. Secara keseluruhan, penerapan aplikasi SAKTI membuktikan bahwa digitalisasi adalah fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, F. (2021). Integrated Financial Management Systems and Budget Performance Improvement. *Journal of Public Sector Finance*, 7(2), 88–102.
- Daeli, A. R., & Ayudiati, C. (2024). Analisis penerapan SAKTI pada instansi pemerintah sebagai sistem pelaporan keuangan terpadu. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 16(1), 240–249.
- Dwihaikal, F. T., & Rukmini, T. (2024). Efisiensi pelaporan bendahara melalui aplikasi SAKTI. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 8(2), 112–121
- Gultom, C. M. J. (2024). Implementasi sistem keuangan digital berbasis HOT-Fit pada instansi pemerintah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 5(1), 76–89.
- Hakim, F., & Kusumah, R. W. R. (2025). Pengaruh SAKTI, SDM, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmiah MEA*, 9(1), 15–27.
- Harjito, D. (2022). Tantangan Organisasi dalam Implementasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 5(1), 55–70.



- Imelda, T. et al. (2024). Strategi pengelolaan keuangan publik berbasis akuntansi pemerintahan. Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(4), 345–351.
- Indonesian Research Journal on Education. (2025). *Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi*. IRJE.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-44/PB/2007 tentang Reformasi Birokrasi Unit Ditjen Perbendaharaan.
- Lestari, A., & Nugraha, D. (2023). Literasi Digital dan Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Keuangan di Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara*, 4(1), 33–
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2017 tentang tugas dan wewenang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Prasojo, E. (2023). *Transformasi Digital Administrasi Publik dan Efisiensi Proses Birokrasi*. Jakarta: UI Press.
- Putri, H. J., & Harahap, S. N. (2024). Pengendalian dokumen keuangan berbasis digital pada instansi pemerintah. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(3), 2917–2927.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode pengumpulan data kualitatif: Observasi, wawancara, dokumentasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 13074–13086.
- Qurratu'Aini, F. (2025). Transparansi anggaran publik dalam perspektif literasi digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 22–31.
- Suryanto, H. (2022). Integritas Organisasi dan Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Negara*, 4(2), 119–134.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Waruwu, M. (2024). *Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, dan peran di bidang pendidikan*. Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.
- Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). *Metode dan instrumen pengumpulan data (kualitatif dan kuantitatif)*. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(3), 161–173.